

**PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM  
PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE  
(DBD) DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA  
TANJUNGPINANG**

**JURNAL**



**OLEH**

**INKA ZAHARA**

**130565201040**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**TANJUNGPINANG**

**2018**

**PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM  
PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE  
(DBD) DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA  
TANJUNGPINANG**

Inka Zahara<sup>1</sup>, Yudhanto Satyagraha A.P<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang tidak pernah berakhir, pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Penyakit ini belum memiliki vaksin penyebabnya tidak hanya factor endemis, kebiasaan dalam masyarakat dan lain-lain. Peranan dari berbagai pihak dalam proses penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue, hal-hal dasar yang bersifat berkelanjutan. Kompleknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bahu membahu secara sinergis melaksanakan pelayanan kesehatan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya bersama mencapai derajat kesehatan yang setingginya.

Dalam penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan serta kader-kader dalam melaksanakan program pemerintah melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien agar meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue telah berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang serta agen terkait dalam melaksanakan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

**Kata Kunci: Peranan, Dinas Kesehatan, Demam Berdarah Dengue**

---

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dilakukan melalui kebijakan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Derajat kesehatan dan status gizi yang tinggi akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sendiri sampai saat ini masih di hadapan dengan masalah kesehatan yang terjadi setiap tahunnya, salah satunya ialah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) yang semakin lama semakin meningkat jumlah pasien serta penyebarannya semakin

luas. Penyakit DBD adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*, serta dapat menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

Hal ini tentu mendorong pemerintah untuk membuat Peraturan tentang menangani penyakit menular yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 tahun 2014 tentang “Penanggulangan Penyakit Menular”, bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien.

Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 5 tahun 2011-2015 menunjukkan trend yang meningkat. Menurut Kabupaten/Kotakabupaten tertinggi DBD tahun 2015 ditemukan di Kota Batam dengan jumlah 639 kasus, Kabupaten Bintan 404 kasus, dan yang terendah Kabupaten Kepulauan Anambas 5 kasus.

**Tabel I**  
**Persentasi Tingkat Pertambahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Di**  
**Provinsi Kepri 2011-2015**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel II**  
**Jumlah Kasus DBD Di Kota Tanjungpinang**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Meninggal
1	2012	331 kasus	2 orang
2	2013	168 kasus	-
3	2014	500 kasus	1 orang
4	2015	347 kasus	3 orang
5	2016	305 kasus	2 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 2016

**Tabel III**

**Penderita Demam Berdarah Dengue per Kecamatan di  
Tanjungpinang tahun 2012-2016**

No	Kecamatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanjungpinang kota	24	7	29	15	20
2	Tanjungpinang barat	69	51	121	56	80
3	Tanjungpinang timur	153	66	317	216	120
4	Bukit bestari	85	44	92	71	88
Jumlah		331	168	559	358	308

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Dengan status Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang masih dihadapkan dengan masalah kesehatan seperti DBD, padahal setiap satu kecamatan pasti ada minimal satu pos kesehatan seperti puskesmas, dengan adanya puskesmas atau pos pos kesehatan lainnya ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan sendiri yang diharapkan mampu menangani atau mencengah penyakit DBD.

Adanya peningkatan jumlah kasus DBD dimungkinkan karena lemahnya kemampuan SDM terkait angka penemuan kasus..Dengan jumlah penduduk 203.153 jiwa (Dinas Kependudukan Kepri 2015), sangatlah mudah bagi nyamuk Aedes untuk menularkan virus Danguue dengan mudah dan banyak faktor yang

mendukung dan menghambat kegiatan pelaksanaan program pemberantasan DBD dikota Tanjungpinang.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“Peranan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Dalam Penanggulangan Penyakit DBD di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang”**.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dan yang lainnya “(sukmadinata: 2006:72)”. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif ini adalah secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana Moleong (2007:3) bahwa penelitian kualitatif adalah : ”prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan yang Di harapkan (*Expected Roles*)

Peranan yang diharapkan (*expected roles*) yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Pelaksanaan penanggulangan DBD sesungguhnya seharusnya sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah keluarkan. Selama ini yang dilakukan dinas kesehatan kota tanjungpinang memang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, ada beberapa kasus yang ditemukan peneliti terkait dengan *expected roles* ini, yaitu perlakuan berbeda atau perlakuan yang berlebihan yang dilakukan birokrat kita.

Mengapa dikatakan demikian, karena berdasarkan hasil observasi yang peneliti buat dinas kesehatan kota tanjungpinang dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue ini agak berlebihan dalam penanganan kasus apa bila orang yang memiliki kedudukan atau orang terdekat mereka yang terjangkit kasus Demam Berdarah Dengue ini.

Sedangkan perlakuan mereka kepada rakyat yang tidak memiliki kedudukan terbilang biasa saja. Kasus seperti ini menurut peneliti berdasarkan teori nawoko diatas merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan arti peran itu. Karena adanya perlakuan berbeda, tetapi dalam hal ini juga dapat ditarik



kesimpulan bahwa seluruh warga Indonesia berhak memiliki atau berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semaksimal dan sebaik mungkin, tidak terkecuali rakyat biasa.

## **B. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*)**

### **1. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Untuk mengendalikan kejadian DBD, kementerian kesehatan terus berkoordinasi dengan daerah terutama dalam pemantauan dan penggiatan surveilans DBD. Beberapa program yang telah di canangkan pemerintah pusat untuk menindak lanjuti penyebaran DBD, seperti 3M plus yaitu segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menguras bak mandi atua tempat penampungan air menggubur barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi, mengatur cahaya dan ventilasi rumah dan masih banyak kegiatan pencegahan lainnya.

### **2. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Pengendalian ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan beberapa cara yaitu perbaikan kualitas media lingkungan meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit dilakukan melalui uapaya penyehatan dan

pengamanan terhadap media lingkungan. Rekayasa lingkungan dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitas lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi. Yang terakhir yaitu dengan peningkatan daya tahan tubuh dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

### **3. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Dalam Pemeberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue**

Dilakukan untuk meniadakan sumber atau gen penularan baik secara fisik, kimiawi dan biologi. Upaya pemberantasan vektor ini yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pemeriksaan jentik berkala, dilakukan dengan car 3M plus atau sekarang 4M plus, menggunakan insektisida pembasmi jentik (larvasida) yang dikenal dengan larvadisasi, kemudian juga memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan kepala timah, ikan gupi ikan cupang dan lain-lain. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan Angka Bebas Jentik (ABJ).

## **KESIMPULAN**

Masalah kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai cara, berdasarkan cara penularannya penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung, penyakit tular vector dan binatang pembawa penyakit. Salah satunya yaitu penularan melalui binatang seperti nyamuk pembawa penyakit DBD, dapat beberapa factor yang menyebabkan penyebaran penyakit DBD yang dibawa oleh nyamuk menjadi wabah atau kejadian luar biasa yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti kesakitan, kecacatan dan bahkan kematian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan. Upaya penanggulangan penyakit menular diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan menutamakan upaya kesehatan masyarakat. Yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar permasalahan kesehatan DBD tidak menjadi sebuah masalah yang terus menerus harus di tangani.

Dalam hakekatnya pejabat kesehatan adalah pegawai negeri sipil dilingkungan kesehatan yang memiliki tugas dan wewenang dibidang

penanggulangan penyakit DBD, dalam melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian serta mengurangi dampak social, budaya, ekonomi.

Peranan dinas kesehatan kota tanjungpinang dalam penanggulangan penyakit demam berdarah dengue sudah terlaksana dengan baik. Meskipun masih belum bisa menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue ke dalam jumlah yang lebih kecil. Karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Terlaksananya program-program kementerian kesehatan karena adanya proses interaksi yang baik dari berbagai pihak terkait penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue, koordinasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang bersama kader kader yang terbilang intens sehingga tercapainya peranan yang baik.

#### **A. Peranan yang Di harapkan (*Expected Roles*)**

Seluruh warga Indonesia berhak memiliki atau berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semaksimal dan sebaik mungkin, tidak terkecuali rakyat biasa. Berdasarkan undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” diaktan bahwa setiap orang memiliki posisi yang sama di mata negara.

Untuk kinerja berdasarkan dengan *expected roless* sudah berjalan baik hanya saja memilki beberapa pekerjaan rumah agar peranan ini berjalan dengan

sempurna agar kegiatan berjalan lebih efektif untuk menekan angka bebas jentik dan angka kasus yang terjadi di tanjungpinang khususnya Kecamatan Tanjungpinang Timur.

### **B. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*)**

Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

1. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam pencegahan penyakit DBD yaitu upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian factor resiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lainnya sesuai dengan ancaman penyakit menular. Kegiatan kegiatannya dapat dilakukan dengan promosi kesehatan, surveilan kesehatan yang seharusnya cukup intens dilaksanakan terlepas dari besar atau kecilnya kasus seharusnya tetap saelalu intens dan gencar dalam melakukan promosi dalam merubah pola fikir masyarakat yang masih sebagian kecil yang sadar akan lingkungan yang sehat. Walaupun saat ini dinas kesehatan sudah cukup baik melaksanakan tugasnya dalam pencegahan penyakit DBD.

2. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam pengendalian penyakit DBD, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan factor resiko penyakit dengan beberapa cara yaitu perbaikan kualitas media lingkungan meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit dilakukan melalui upaya penyehatan dan

pengamanan terhadap media lingkungan. Rekayasa lingkungan dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitas lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi. Yang terakhir yaitu dengan peningkatan daya tahan tubuh dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat. Disini kinerja dari DINKES Kota Tanjungpinang masih minim karena belum ada perintah dalam melakukan pembaruan lingkungan, banyak tempat dikota tanjungpinang yang memiliki potensi potensi sarang penyakit yang belum diperbarui, karena Tanjungpinang sendiri masih dalam masa pembangunan.

3. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dalam pemberantasan DBD, dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan baik secara fisik kimiawi dan biologi. Seperti 3m atau 4m plus, menabur bubuk larvasida, dan memelihara ikan pemakan jentik di tempat penampungan air, dalam hal ini peran dan tugas DINKES sudah terlaksana dengan baik dalam hal membagikan bubuk larvasida terlepas dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan kegiatan seperti 3M atau 4M plus dan memelihara ikan pemakan jentik.

## **SARAN**

Dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tentang penyakit menular, Penanggulangan atau pemberantasan penyakit DBD ini tentu jelas memerlukan campur tangan dari pemerintah setempat bersama dengan masyarakat, artinya semua pihak diharapkan kerja samanya sesuai dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing.

Sudah banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tentang penyakit DBD ini, apabila semua kegiatan penanggulangan DBD Dilakukan Dengan Intensif, maka populasi nyamuk aeydes aegypti penyebab DBD dapat dikendalikan sehingga penularan dapat dicegah dan dapat dikurangi, untuk pembinaan peran serta masyarakat perlu dilakukan penyuluhan dan motifasi yang intensif melalui berbagai jalur komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan DBD sangat diperlukan peran serta masyarakat, baik membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberantasan maupun pemberantasan jentik nyamuk penularnya. Pemerintah harus lebih aktif lagi menanamkan pemikiran kepada masyarakat bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati, karena vaksin untuk mencegah dan obat untuk membasmi virusnya belum tersedia. Pemerintah diharapkan untuk selalu siaga dalam menanggulangi kasus DBD.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bungin, Burhan H.M, 2007. *“Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonom, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial”*, Kencana Pernama Media Group, Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *“Pencegahan Dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue Di Indonesia”*, Jakarta. Bakti Husada,
- Giroth, Lexie, M., 2004, *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*, Indrapraharta, Jatinangor, hal 25-26
- Herdiansyah. Haris, 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial”*, Salemba Humanika, Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, 2011, *“Modul Pengendalian Demam Berdarah Dengue”*, Jakarta, Bakti Husada
- Kozier Barbara, 2004. *Fundamental of Nursing: Concepts, Process and Practice-7th Edition*, (New Jersey), hal. 21
- Levinso dan Soekanto, 2009, *“Peranan”*, Edisi Baru Raja Wali Pers, Jakarta
- Moleong, lexy J, 2007. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Narwoko, Suyanto, 2004. *“Sosiologi Teks dan Pengantar Terapan”*. Jakarta: Kencana.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *“kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru”*. Jakarta : Rineka Cipta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka jakarta
- Rahmat dan Padang Gunawan. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung . Penerbit Pustaka Setia
- Rivai, veithzal. 2003. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Gafindo Persada.
- Sedarmayani. 2012. *Good Governance And Good Corporate Governance*. Bandung . Mandar Maju
- Selamet, Margono. 2000. *Memantapkan posisi dan meningkatkan peran penyuluhan pembangunan dalam pembangunan*. Dalam proseding seminar



IPB bogor: pemberdayaan sumber daya manusia menuju terwujudnya masyarakat medan. Pustaka wirausaha muda.

Sujarweni, V.Wiratnata. 2014, “*metodologi penelitian*”. Yogyakarta. Pustakabarupress

Soerjono Soekanto,2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grando Persada, Jakarta, hal 268

Sugiyono.,2009. “*Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*”. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, 2006. “ *Metode Peneltian Pendidikan*”, Remaja Rosdakarya, Bandung

### **B. Jurnal**

Fathi, 2005. *Peran Faktor Lingkungan dan Perilaku Terhadap Penularan Demam Berdarah Dengue di Kota Mataram*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol. 2, NO. 21, JULI 2005 :1 – 10.

Taviv, 2010. *Pengendalian DBD Melalui Pemanfaatan Pemantauan Jentik dan Ikan cupang di Kota Palembang*.

### **C. Website**

<http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/79792-wargatanjungpinang-diminta-terapkan-3-m.html>, diakses pada 3 April 2017 jam 15.30

<http://haluankepri.com/tanjungpinang/87359-kepri-waspada-demam-berdarah.html>, diakses pada 3 April 2017 jam 15.31

<http://tanjungpinangkota.bps.go.id>